

Elite Lokal dan Upaya Pembentukan Wajah Baru Identitas Melayu di Indonesia Pascareformasi

Local Elite and New Face Formation Effort for Identity of Malays in Indonesia Post-Reformation

ALFARABI, ANTAR VENUS, NURYAH ASRI SYAFIRAH & NOOR EFNI SALAM

ABSTRAK

Pembentukan identitas baru Melayu pascareformasi dimulai ketika kebijakan otonomi daerah dan sistem politik pemilihan langsung bertemu dengan kekuatan elite lokal. Reformasi telah mendorong masyarakat Melayu Riau untuk mulai menunjukkan eksistensi mereka di daerah sendiri. Jalan yang diambil untuk menunjukkan eksistensi tersebut dilakukan dengan merekonstruksi identitas Orang Melayu. Aktor yang mengambil bahagian dalam rekonstruksi identitas Melayu tersebut adalah elit lokal. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana identitas Orang Melayu Riau dikonstruksi elit lokal untuk memberikan citra dan posisi sosial yang lebih strategis di tengah masyarakat. Analisis hasil penelitian menggunakan teori tindakan sosial dan pendekatan penelitian menggunakan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data utama menggunakan tehnik wawancara mendalam dan pengamatan. Dari hasil wawancara didapatkan dua bentuk identitas baru Melayu pascareformasi iaitu Melayu itu adalah Islam dan Melayu itu adalah anak negeri. Identitas baru tersebut bertujuan mereposisi kedudukan masyarakat Melayu dalam sistem sosial-politik di Riau. Konsekuensi dari pembentukan identitas baru Melayu adalah tuntutan kepada pemerintah, perusahaan dan pendatang yang ada di Riau untuk lebih mengutamakan Orang Melayu dalam bidang sosial, ekonomi dan politik lokal. Hasil penelitian menemukan bahawa motif pembentukan identitas baru Melayu pascareformasi adalah kekecewaan Orang Melayu di masa lalu yang banyak dirugikan oleh kebijakan Negara, perusahaan dan pendatang di Riau. Kekecewaan tersebut diolah oleh elit menjadi politik identitas sehingga menjadi kekuatan untuk menekan pihak-pihak yang dianggap merugikan Orang Melayu. Tujuan pembentukan identitas baru Melayu pascareformasi adalah melakukan reposisi kedudukan di bidang sosial, ekonomi dan politik dengan Orang Melayu di Riau diutamakan untuk menduduki posisi-posisi strategis.

Kata kunci: Melayu; rekonstruksi; identitas; elit; tindakan

ABSTRACT

The establishment of a new Malay identity after the post-reformation began when the policy of regional autonomy and the electoral political system directly met with the strength of the local elite. Reformation has encouraged Riau Malay people to begin showing their existence in their own regions. The path taken to demonstrate this existence is done by reconstructing the identity of the Malay People. Actors who take part in the reconstruction of Malay identity are local elite. This study describes how the identity of Riau Malays is constructed by local elite to provide a more strategic image and social position in the community. Analysis of research results using social action theory and research approach using case study methods. The main data collection technique uses in-depth interview and observation. The result from interviewed, two new forms of Malay identity after the reformation, namely the Malay is Islam and the Malay is Anak Negeri. The new identity aims to reposition the position of the Malay community in the socio-political system in Riau. The consequence of forming a new Malay identity is the assertion for the government, companies and migrants in Riau to prioritize Malay People in the social, economic and local politics. The results of the study found that the motive for the formation of a new Malay identity after reformation was the disappointment of the Malay People in the past, who were greatly harmed by the policies of the State, companies and migrants in Riau. The disappointment is processed by the elite into identity politics so that it becomes a force to suppress

those who are considered detrimental to the Malay People. The aim of establishing a new identity for the post-reformation Malay was to reposition the position in the social, economic and political fields where Malay People in Riau were prioritized to occupy strategic positions.

Keywords: Malay; reconstruction; identity; elite; action

PENGENALAN

Tumbangnya rezim pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 dan perubahan sistem politik telah memberi dampak bagi demokratisasi di Indonesia. Proses demokratisasi yang salah satunya adalah penerapan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak pada keberadaan dan peran elit lokal yang telah mapan sepanjang rezim Orde Baru berkuasa. Di era demokratisasi dan desentralisasi untuk memperebutkan dan mempertahankan posisi sebagai elit lokal harus dilakukan melalui proses kompetisi yang relatif ketat di antara individu-individu yang mengincar posisi tersebut. Hal ini tidak terjadi pada saat rezim Orde Baru berkuasa, di mana peran Negara sedemikian dominan, kemunculan dan peran elit politik lokal tidak bebas dari campur tangan pemerintah. Pada era otoritarian pemerintahan Orde Baru elit politik lokal lebih sering memainkan peran untuk mewujudkan kepentingan pemerintah pusat ketimbang merealisasikan kepentingan dan kebutuhan daerah. Elit lokal cenderung melakukan peran sebagai perpanjangan tangan negara, dalam hal ini pemerintah pusat, untuk mengkooptasi masyarakat. Untuk mewujudkan kepentingan tersebut, Negara sangat berkepentingan dalam hal memilih dan menentukan peran yang diemban oleh elit lokal. Keadaan tersebut di atas mengindikasikan bahwa sepanjang rezim Orde Baru mengendalikan roda pemerintahan, keberadaan dan peran elit lokal lebih banyak ditopang dan tergantung pada negara.

Tumbangnya rezim pemerintahan Orde Baru menghadirkan ruang yang lebih luas bagi elit politik lokal untuk mengekspresikan keberadaan dan perannya yang sebelumnya terkungkung dominasi pemerintah. Melemahnya peran negara yang diikuti dengan berkembangnya situasi kondusif bagi demokratisasi, menjadikan elit lokal berupaya secara mandiri untuk tetap memegang peranan di tengah masyarakat. Elit lokal harus mampu membangun pijakan baru sebagai basis kekuasaannya untuk menopang posisinya. Hal ini terjadi karena mereka tidak mungkin lagi menyandarkan diri pada negara yang semakin lemah kontrolnya. Perubahan konteks pemegang kebijakan strategis pascareformasi di

Pekanbaru Riau telah memberikan kesadaran pada masyarakat Melayu bahwa mereka harus memegang peran yang jauh lebih strategis di wilayah sendiri. Kesadaran bahwa masyarakat Melayu seharusnya menjadi kelompok yang paling besar menerima keuntungan dari daerahnya sendiri telah mendorong munculnya identitas lokal. Kemunculan identitas lokal ini merupakan suatu tindakan untuk membuat garis tegas antara mereka yang mengaku sebagai tuan rumah dan mereka yang dipersepsikan sebagai pendatang. Kesamaan identitas dan kesamaan nasib telah membuat ikatan-ikatan primordial *Orang Melayu* mulai mengental dan memunculkan keberanian untuk bersuara. Keberanian bersuara tersebut diperkuat dengan kebijakan otonomi daerah dan sistem politik pemilihan langsung yang mendorong politik identitas menjadi strategis.

Politik identitas menjadi elemen penting yang diolah oleh elit lokal untuk menampilkan identitas baru masyarakat Melayu. Identitas baru ini menjadi penting kerana di tengah masyarakat berkembang stereotip negatif tentang identitas etnik Melayu di Pekanbaru Riau. Label negatif tersebut dijadikan pandangan umum tentang masyarakat Melayu Riau yang justru tidak bisa di-*counter* oleh masyarakat *Melayu* itu sendiri. Stereotip tentang masyarakat Melayu yang pemalas dan tidak suka bekerja keras menjadi salah satu alasan diperlukannya wajah Melayu baru pascareformasi. Tiga puluh dua tahun berada dalam tekanan pemerintahan Orde Baru tidak hanya membuat identitas Melayu terpinggirkan, tetapi juga melahirkan label karakter masyarakat Melayu yang negatif. Selama itu pula masyarakat Melayu Riau hanya bisa diam dan tidak dapat mengaktualisasikan kebanggaan identitasnya sebagai tuan rumah (Andriana 2011; Haboddin 2012).

Rekonstruksi wajah baru identitas Melayu berjalan cepat karena menggunakan emosional masyarakat Melayu yang telah lama berada dalam kekecewaan secara struktural dan kultural. Momentum runtuhnya pemerintahan Orde Baru dan datangnya era reformasi telah mendorong masyarakat Melayu Indonesia mulai berani merekonstruksi identitas Melayu yang baru. Aktor yang berperan dalam merekonstruksi identitas baru

bagi masyarakat Melayu Riau ini adalah kalangan elit lokal Melayu. Penelitian yang pernah dilakukan Salam (2012) mengungkap bahwa elit Melayu Riau melakukan penguatan identitas melalui konsolidasi dan negosiasi simbol selembayung dan busana Melayu pada masyarakat Pekanbaru Riau. Sementara penelitian yang dilakukan Andriana (2011) terhadap arsitektur bangunan perpustakaan Provinsi Riau mengungkap bahwa ada pergeseran keseriusan dari elit Melayu dalam memelihara identitas budaya lokal. Upaya elit Melayu dalam membentuk identitas Melayu di Riau merupakan sesuatu yang menarik dikaji dalam sudut pandang komunikasi. Pengelolaan wacana dari kacamata komunikasi dapat dimaknai sebagai proses pengelolaan pesan oleh elit agar dapat diterima oleh khalayak Melayu. Usaha elit Melayu untuk membentuk wajah baru pascareformasi memiliki motif dan tujuan tertentu. Pembentukan wajah baru tersebut menjadi penting karena berhubungan dengan peran dan posisi masyarakat Melayu di Riau. Dalam konteks komunikasi, rekonstruksi wajah identitas Melayu merupakan upaya komunikasi elit dalam mempersuasi masyarakat Melayu Riau untuk menjadi Melayu baru. Selain itu, posisi elit yang dekat dengan lingkaran kekuasaan akan menjadi salah satu daya tarik untuk melihat bagaimana wacana identitas juga berhubungan dengan kekuasaan pada peringkat lokal.

KONSEP DAN TEORITIKAL

Membahas keberadaan elit pada hakikatnya membahas pihak yang mempunyai kewenangan dan keberadaan mereka yang mempunyai kewenangan hanya bermakna manakala dihadapkan pada pihak yang tidak memiliki kewenangan. Penelitian yang dilakukan oleh Haryanyo (2009) menyatakan bahwa elit memiliki kewenangan yang lebih besar dibandingkan dengan kewenangan yang melekat pada masyarakat umum. Elit dinyatakan sebagai individu-individu yang menduduki posisi komando pada puncak pranata-pranata utama yang ada di masyarakat; dan karena kedudukannya itu maka elit dapat mengambil keputusan yang mengikat seluruh anggota masyarakat. Elit dalam etnik Melayu disebut juga pimpinan atau raja yang memegang amanah dan memiliki kedaulatan serta berposisi sebagai khilafah Allah SWT (Husain, Ngah & Din 2017). Dalam penelitian ini elit Melayu Riau merujuk pada sekelompok kecil masyarakat yang menguasai arus komunikasi

utama dalam mewacanakan isu Melayu baru dan mereka dijadikan rujukan masyarakat. Elite Melayu ini memiliki jabatan tertentu dengan status sosial ekonomi yang tinggi atau memiliki geneologi pada kerajaan tertentu. Jabatan dan kekayaan membuat individu-individu tersebut dijadikan rujukan oleh masyarakat dalam mendefinisikan Melayu baru. Dalam konteks konstruksi wajah baru Melayu Riau maka elit memiliki kekuatan untuk mendefinisikan identitas baru tersebut dan menyebarkanluaskannya pada masyarakat.

Seorang individu dapat meraih dan menduduki posisi jabatan yang berpengaruh di tengah masyarakat apabila yang bersangkutan mempunyai sumber daya sebagai basis dan mampu mengoptimalkannya. Kekuasaan yang diperoleh elit disebabkan adanya sumber daya yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mendominasi orang lain atau kelompok lain sesuai yang diinginkan (Prasetya 2014). Kajian Sjaif (2012) menyatakan bahwa individu yang mewujud dalam bentuk elite di arena ekonomi politik lokal mendapatkan kemampuan mendominasi masyarakat dengan cara mereproduksi identitas etnik untuk kepentingan ekonomi dan politik. Proses mereproduksi identitas di tanah Melayu membutuhkan kemampuan dalam mengelola pesan dengan baik. Oleh karena itu diperlukan kecakapan komunikasi yang baik. Pentingnya kecakapan berbicara pada masyarakat Melayu ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Prasetya (2014) yang melihat elite sebagai seseorang atau kelompok yang dianggap mempunyai kecakapan dalam memberikan arahan dan pemahaman kepada masyarakat. Pentingnya kecakapan berkomunikasi ini disebabkan karakter masyarakat Melayu yang lebih bersifat ekspresi dibanding persepsi (Venus 2015). Dorongan untuk mengekspresikan diri pada masyarakat Melayu berlaku untuk berbagai situasi baik komunikasi antarpribadi, kelompok ataupun konteks komunikasi lainnya. Pentingnya mengekspresikan diri pada masyarakat Melayu dinyatakan dalam ungkapan “pantang bercakap mulut disumbat” (Venus 2015). Namun demikian wujud dari perjuangan Orang Melayu tidaklah dilakukan secara revolusi atau kekerasan, perjuangan tersebut dijalankan dengan berhati-hati, lemah lembut dan melalui perundingan (Din et al. 2017).

Pada umumnya sumber daya yang berkaitan dengan nilai primordial sulit untuk lepas dari isu etnisitas terutama di masyarakat yang sedang berkembang dan memiliki keberagaman etnis. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kenyataan bahwa etnik pendatang tetap mempertahankan identitasnya

walaupun telah lama mendiami suatu wilayah baru (Hun & Kaur 2014). Di masyarakat yang memiliki keberagaman etnis tinggi, ikatan primordial etnisitas dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber daya oleh seseorang yang berupaya merebut posisi jabatan sebagai elit di ranah lokal. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetya (2014) menjelaskan bahwa kekuasaan diperoleh elit kerana adanya sumber-sumber yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok, yang dapat dijadikan sebagai alat atau sarana untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok lain sesuai yang diinginkan. Sumber daya kekuasaan tersebut diantaranya (a) nilai primordial, (b) sesuatu yang dianggap suci, (c) kharisma atau daya tarik pribadi, (d) kepemilikan instrumen, seperti keahlian atau ketrampilan, dan (e) legalitas (Charls F. Andrain dalam Haryanto 2009). Dari berbagai sumber daya tersebut, nilai primordial dianggap paling menonjol di Negara berkembang dalam meraih kekuasaan. Situasi tersebut disebabkan dalam masyarakat plural, politik kompetitif secara mendasar dicirikan oleh politik etnis. Pengoptimalan ikatan primordial etnisitas tersebut dilakukan salahsatunya melalui melalui memobilisasi kelompok etnis.

Perubahan yang terjadi dalam relasi kekuasaan akan membawa perubahan pada cara bagaimana kelompok memaknai dirinya dan memaknai hubungannya dengan kelompok lainnya. Dengan demikian perubahan kekuasaan di tingkat pusat membawa dampak juga kepada elit di tingkat lokal. Elit lokal dari etnis tertentu yang selama ini dikekang oleh struktur, dengan adanya perubahan relasi kekuasaan sangat mungkin akan memperoleh peluang atau diberdayakan oleh struktur. Atau sebaliknya, elit lokal yang selama ini memperoleh peluang atau diberdayakan, dengan adanya perubahan tersebut akan dibatasi atau dikekang oleh struktur. Dengan demikian tindakan elit Melayu dalam membentuk wajah baru Melayu memiliki konsekuensi terhadap kedudukan elit dalam struktur masyarakat.

Kajian terhadap tindakan sosial elit Melayu dalam mengonstruksi wajah baru Melayu dianalisis menggunakan pendekatan teori tindakan sosial dari Max Weber. Teori ini digunakan karena dapat menjelaskan makna tindakan elit bagi diri mereka dan bagaimana tindakan tersebut diarahkan kepada orang lain (Basid & Niswah 2018). Dalam kacamata Weber, untuk memahami kelompok maka harus memahami tindakan-tindakan yang dilakukan mereka berikut alasannya. Terdapat empat klasifikasi tipe tindakan yang dibuat oleh Weber: tindakan tradisional, tindakan afektif, rasionalitas

instrumental dan rasionalitas nilai (Muhlis & Norkholis 2016). Tindakan tradisional merupakan tindakan yang ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar secara turun-temurun. Tindakan afektif merupakan tindakan yang ditentukan oleh kondisi-kondisi dan orientasi-orientasi emosional si aktor. Tindakan rasionalitas instrumental adalah tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan yang secara rasional diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan. Tindakan rasionalitas nilai adalah tindakan rasional berdasarkan nilai yang dilakukan untuk alasan-alasan dan tujuan-tujuan yang ada kaitanya dengan nilai-nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek-prospek yang ada kaitanya dengan berhasil atau gagalnya tindakan tersebut (Muhlis & Norkholis 2016).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pertimbangan pemilihan metode ini karena tema rekonstruksi identitas Melayu merupakan studi tentang suatu kasus dalam kehidupan nyata, dalam konteks atau latar kontemporer (Creswell 2014). Proses pengumpulan data dilakukan secara detail dan mendalam serta melibatkan beragam sumber informasi seperti pengamatan, wawancara, dan dokumen dan berbagai laporan. Penelitian ini dimulai dengan peran elit lokal Melayu dalam mewacanakan identitas kemelayuan Riau. Dalam proses wacana identitas ini ditemukan tindakan elit yang memiliki motif dan tujuan dalam memberi wajah baru Melayu. Analisis data berjalan secara holistik dari keseluruhan kasus. Melalui pengumpulan data, deskripsi detail perkembangan kasus konstruksi identitas Melayu dapat diikuti oleh peneliti.

Peneliti terlibat langsung dalam pengalaman yang berkelanjutan dan terus-menerus dengan para partisipan. Keterlibatan ini menghasilkan serangkaian isu-isu strategis dan personal dalam proses penelitian kualitatif. Pada tahap awal peneliti bertemu dengan key informant yang merupakan tokoh yang dianggap berpengaruh di Pekanbaru. Penentuan key informant didasarkan pada kriteria yang peneliti buat sebelumnya, meliputi; tokoh yang dijadikan referensi bagi masyarakat dalam konteks sosial-budaya, tokoh yang beraktifitas langsung dalam mengkaji budaya Melayu dan tokoh yang memahami permasalahan tema penelitian secara

mendalam. Pada penelitian ini key informant adalah Al Azhar, seorang ketua Lembaga Adat Melayu Riau dan telah lama berkecimpung dalam memperjuangkan maruah Melayu di provinsi Riau. Dari Al Azhar, peneliti mendapatkan beberapa nama yang bisa dijadikan informan selanjutnya untuk dilakukan wawancara. Rekomendasi dari key informant tersebut mempermudah peneliti dalam komunikasi awal dengan calon informan selanjutnya. Lokasi penelitian berada di kota Pekanbaru. Pemilihan kota Pekanbaru berasaskan pertimbangan bahawa elit lokal Melayu Riau banyak berdomisili di ibukota Provinsi Riau tersebut.

HASIL KAJIAN

REDEFINISIKAN KARAKTER MELAYU

Upaya elit Melayu dalam mengkonstruksi wajah baru identitas Melayu diawali dengan mendekonstruksi stereotip karakter Orang Melayu. Stereotip pemalas, tidak suka bekerja keras, suka bersenang-senang, menghabiskan waktu di kedai kopi dan menjauhi konflik telah dilekatkan sebagai karakter masyarakat Melayu. Dalam pandangan elit lokal stereotip tersebut telah membuat daya tawar masyarakat Melayu menjadi lemah terhadap etnik lain. Tindakan elit untuk mengubah pandangan yang merugikan tersebut disebabkan stereotip tersebut tidak hanya disematkan oleh etnik pendatang yang ada di Riau, tetapi juga mulai diakui oleh sebagian masyarakat Melayu itu sendiri. Stereotip negatif lahir dari kebiasaan masyarakat Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan tersebut berhubungan dengan cara hidup dan menghadapi pendatang yang hadir di daerah Melayu.

Salah satu stereotip Orang Melayu adalah kebiasaannya dalam menyambut pendatang. Orang Melayu dikenal sebagai etnik yang terbuka, baik, dan merangkul setiap tamu yang hadir di daerahnya. Keterbukaan Orang Melayu ini pada akhirnya sering dimanfaatkan oleh pendatang dalam mengambil keuntungan. Pengambilan keuntungan dari Orang Melayu ini berdampak besar kerana lama-kelamaan menggeser Melayu dalam kepemilikan tanah. Dari peristiwa tersebut lahirlah stereotip tentang karakter Orang Melayu yang mudah dimanfaatkan. Gambaran kebaikan Orang Melayu dipaparkan Eddy Sabli (informan 5) berikut ini.

“Karakter Orang Melayu itu sangat terbuka. Terbuka kepada siapa saja para pendatang yang hadir. Namun akhirnya karena saking terbukanya, Orang Melayu sendiri

tersingkir oleh pendatang. Hal ini dikarenakan saat ada pendatang datang, Orang Melayu selalu mempersilahkan. Ibarat rumah, pintu selalu terbuka. Hal ini sering dimanfaatkan pendatang. Tidak hanya sampai teras dan ruang tamu, tapi juga sampai kamar dan dapur”.

Pernyataan tersebut menggambarkan bagaimana totalnya Orang Melayu dalam melayani tamu yang berkunjung ke wilayahnya. Namun demikian menurut Sabli, istilah Orang Melayu mudah dimanfaatkan merupakan sudut pandang yang dilihat dari pendatang. Masyarakat Melayu sendiri lebih suka menyebut diri mereka terbuka dan merangkul. Karakter tersebut merupakan perwujudan dari nilai-nilai Islam yang harus tetap dipertahankan. Menurut Eddy Sabli (Informan 5) keterbukaan masyarakat Melayu merupakan karakter dasar Orang Melayu yang tidak perlu dikhawatirkan. Hanya diperlukan kewaspadaan masyarakat Melayu terhadap pendatang karena zaman telah berubah.

“Inilah yang tidak disadari oleh orang Melayu. Zaman sudah berubah. Dahulu rumah tak ada berkunci, karena semua masih percaya dan aman, kini jangan coba-coba meninggalkan rumah tanpa dikunci. Inilah yang harus disadari oleh Orang Melayu. Banyak sekali lahan di daerah dikuasai pendatang dengan meminjam kekuasaan atau administrasi orang Melayu. Ada yang ikut kartu keluarga Orang Melayu sehingga bisa membuka hutan hingga akhirnya mereka banyak mendapatkan keuntungan. Orang Melayu banyak belum sadar dimanfaatkan” (Eddy Sabli, informan 5).

Selanjutnya terdapat juga stereotip tentang kebiasaan Orang Melayu yang suka berkumpul di warung kopi dan mengobrol menghabiskan waktu sepanjang hari. Terdapat istilah untuk menggambarkan aktivitas tersebut, yaitu *‘berbual-bual’*. Sebuah istilah untuk menggambarkan bahwa obrolan yang dilakukan tidak penting dan hanya menghabiskan waktu. Aktivitas *‘berbual-bual’* tersebut menjadi kontras karena pada waktu yang sama kegiatan yang dilakukan orang lain adalah bekerja. Orang Melayu dianggap terlalu sering *berleha-leha*. Dari aktifitas tersebut muncul anggapan bahwa orang Melayu itu pemalas. Selain pemalas stereotip lain yang diungkapkan adalah *‘Orang Melayu tidak mau bekerja keras’*. Stereotip ini dihubungkan dengan situasi bahwa Provinsi Riau sedang giat membangun dan membutuhkan banyak tenaga kerja. Aktivitas pendatang yang siap bekerja di segala bidang dikontraskan dengan masyarakat Melayu yang hanya memilih bidang-bidang tertentu. Eddy Ahmad (informan 7) yang peneliti temui menceritakan bahwa pilihan pekerjaan favorit masyarakat Melayu adalah Pegawai Negeri Sipil

(PNS). Pilihan PNS diambil karena kerjanya lebih santai, banyak liburanya dan bisa pulang lebih cepat. Pilihan menjadi PNS juga dianggap dekat dengan aktifitas kehidupan istana seperti era kerajaan Melayu. PNS dapat diibaratkan pegawai-pegawai kerajaan di era modern. Konsekuensi dari pilihan pekerjaan yang hanya terkonsentrasi pada PNS membuat bidang pekerjaan-pekerjaan lain seperti pedagang, buruh, dan petani yang membutuhkan tenaga besar dan waktu lebih panjang diambil alih oleh pendatang dari suku Minang, Jawa dan Sumatera Utara. Masyarakat Melayu dianggap pilih-pilih dalam bekerja.

Elit Melayu melihat stereotip negatif tersebut dikarenakan etnik pendatang tidak memahami latar kehidupan Orang Melayu itu sendiri. Ketidakhahaman tersebut membuat pendatang salah mengartikan perilaku masyarakat Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Secara tegas elit Melayu menolak stereotip negatif tersebut dan memberikan wacana tandingan terhadap wacana yang sudah lama berkembang tersebut. Stereotip bahwa masyarakat Melayu itu pemalas dan tidak suka bekerja keras dibantah elit Melayu. Alam Melayu yang kaya sumber daya alam telah mendidik masyarakatnya seperti sekarang ini. Alam Melayu yang sangat kaya, tanah subur dan sungai yang dipenuhi banyak ikan telah membuat masyarakat Melayu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya cukup dengan menanam padi beberapa petak, menanam sayur di sekitar rumah, dan menjala ikan di sungai. Menanak nasi, memasak sayur ditambah hasil tangkapan ikan hari itu sudah cukup bagi masyarakat Melayu di masa lalu.

“Orang Melayu itu bukan pemalas, tapi cukup dengan yang telah didapat. Orang Melayu tidak rakus dalam mengeksploitasi alam (Darmawi, Informan 9).

Selain itu sebagai etnik yang berpedoman kepada Alquran dan hadis, stereotip bahwa Orang Melayu itu pemalas dan tidak suka berkerja keras ditolak karena bertentangan dengan ajaran Islam. Melayu yang identik dengan Islam tidak akan mungkin tindakan dan perilakunya bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Syafruddin (Informan 3) berikut ini

“... Itu *image* yang sengaja di arahkan untuk membunuh karakter orang Melayu. Siapa bilang Orang Melayu pemalas, sebab Orang Melayu itu yang jati diri Melayu betul dilandasi oleh Islam. Orang Islam adalah orang yang rajin yang tidak ada waktunya sia-sia. Sebab satu titik dalam bidang ini akan dipertanggung jawabkan. Ada dalam fikih jati diri itu, diam orang Melayu itu ibadah.

Diamnya saja ibadah, dia berdzikir. Dari pada dia hiruk-pikuk ikut campur bicara atau tindakan, dia lebih baik dia diam”.

Masyarakat Melayu juga dianggap memiliki karakter menjauhi konflik. Karakter menjauhi konflik ini dimaknai selalu mengalah ketika berselisih dengan orang lain. Dampak selalu mengalah ini membuat Orang Melayu lama-kelamaan tersingkir dengan kehadiran pendatang. Karakter Orang Melayu yang menjauhi konflik tersebut membuat beberapa permasalahan yang membutuhkan tindakan langsung tidak dapat diselesaikan secara cepat. Menurut Eddy Sabli (informan 5) karakter menghindari konflik dimanfaatkan juga oleh pendatang dengan mengambil hak-hak yang dimiliki masyarakat Melayu, terutama lahan. Pendatang di Riau berani menggarap lahan masyarakat Melayu karena menyadari karakter Orang Melayu cenderung menghindari konflik. Apabila lahannya digarap pendatang dan timbul perselisihan maka Orang Melayu cenderung mengalah dan membagi dua lahan dengan penggarapnya. Perbuatan pendatang yang ditolerir oleh masyarakat Melayu melahirkan anggapan bahwa karena sikapnya yang baik maka Orang Melayu cenderung kalah jika diajak berunding. Gambaran karakter Orang Melayu tersebut seperti diceritakan oleh Fakhrunas (Informan 4)

“Orang Melayu masih dengan karakter-karakter dasar tadi, dia terbuka terhadap tamu yang datang, dia ketemu orang berprasangka baik saja, dia tuh sama orang, dia terima, kemudian dia tidak mau berkonflik, kemudian dia mengalah-mengalah saja, akhirnya dunia cepat berubah begini, akhirnya lama-lama dia terpinggirkan”.

Namun demikian karakter Orang Melayu yang menghindari konflik mendapat penolakan dari elit Melayu. Menurut UU Hamidy (informan 10) karakter masyarakat Melayu dalam berhadapan dengan konflik bukanlah menghindarinya, tetapi sedapat mungkin diselesaikan. Tujuan penyelesaian konflik adalah memberikan keputusan yang bisa diterima kedua belah pihak. Prinsip yang dipegang dalam penyelesaian konflik adalah tidak ada yang ‘kehilangan muka’. Dalam kehidupan sehari-hari konflik sedapat mungkin diminimalisir karena secara umum masyarakat Melayu itu cinta damai. Penyelesaian konflik adalah dengan cara memenuhi kebutuhan orang-orang yang berkonflik sehingga kedamaian itu bisa tercipta. Kebaikan dan keterbukaan Orang Melayu sebagai tuan rumah tidak serta merta membuat mereka berbuat tidak adil ketika berselisih dengan pendatang. Hal ini

menurut UU Hamidy (informan 10) karena Orang Melayu berpegangan pada Alquran dan hadist sebagai pegangan kehidupan.

“Karena Melayu itu Islam, Islam itu puncaknya adalah akhlak dan akhlak itu adalah syariat. Alquran apa yang dikatakan, semua nya adalah pedoman, pedoman adalah aturan. Hadist dan nabi itu semuanya adalah aturan, aturan itu adalah akhlak. Akhlak Orang Melayu dalam kehidupan sehari-hari pastilah cerminan dari Islam”.

Gambaran redefinisi identitas Melayu pascareformasi dapat dilihat pada Jadual 1.

Proses meredefinisi karakter Orang Melayu merupakan usaha dalam mengkonstruksi identitas Orang Melayu di Pekanbaru Riau. Hal ini merupakan usaha dari elit lokal untuk menampilkan wajah Melayu yang baru. Wajah ini diidentikan dengan nilai-nilai Islam. Bisa dikatakan proses redefinisi Orang Melayu di Pekanbaru Riau merupakan proses memberikan nilai-nilai Islam dalam setiap karakter Orang Melayu itu sendiri. Wajah baru Melayu yang dibentuk para elit lokal membangun karakter identitas yang lebih baik dalam memaknai tindakan Orang Melayu dalam kehidupan sehari-hari.

ANAK NEGERI: WAJAH MELAYU BARU

Wajah baru Melayu berikutnya yang dibentuk elit adalah *anak negeri*. Sebutan *anak negeri* awalnya dimunculkan dalam konteks hak sumber daya alam yang ada di Riau. Selanjutnya slogan tersebut ikut mewarnai politik lokal di Riau. Wacana tentang eksploitasi kekayaan alam Riau yang keuntungannya dinikmati oleh pemerintah pusat dan perusahaan besar telah melahirkan tuntutan bagi hasil keuntungan yang adil.

“Pemerintah pusat tidak adil terhadap daerah Riau. Riau sebagai daerah penghasil minyak ya. Itu ya lebih kurang 70%. Penghasilan minyak bumi, minyak dan gas. Nah itu orang Riau tidak pernah menikmati. Jalan Riau banyak Rusak, iya kan? Infrastruktur, jalan-jalan ini rusak semua. Tengoklah jalan Sumatera ini mana ada

yang bagus. Coba kita tengok di Jawa, jalan tol semua. Jadi akibat ketidakadilan pemerintah pusat ini, Riau ingin meminta hak sebagai penghasil, iya kan?” (Budi Hermato, Informan 6).

Pada konteks ini identitas Melayu sebagai *anak negeri* disematkan sebagai pihak yang menuntut keadilan.

Anak negeri merupakan identitas baru yang dibentuk elit karena selama ini Orang Melayu hanya menjadi penonton kebijakan pemerintah dalam penggerakan sumber daya alam Riau. Runtuhnya pemerintahan Orde Baru dan masuknya era reformasi tidak banyak mengubah nasib Orang Melayu. Perusahaan besar di Riau tetap lebih memprioritaskan pendatang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kondisi tersebut membuat Orang Melayu tetap belum bisa menikmati kekayaan alam Riau.

“Pascareformasi dan otonomi daerah, Orang Melayu kurang mendapat kesempatan. Contohnya di Chevron (perusahaan minyak bumi di Riau). Di Chevron lebih mengutamakan alumni, misalnya ITB (Institut Teknologi Bandung). Akhirnya karena tidak banyak kesempatan maka untuk menghidupi dan pendidikan anaknya maka orang Melayu jual lahan” (Budi Hermanto, Informan 6)

Elit Melayu sadar pentingnya peran sebagai tuan rumah untuk mendorong masyarakat Melayu menuntut hak-hak mereka sebagai pemilik wilayah sekaligus pemilik kekayaan alam. *Anak negeri* pada akhirnya berubah menjadi simbol perlawanan masyarakat Melayu kepada berbagai pihak yang dianggap bertanggungjawab terhadap pengerukan kekayaan alam Riau. Pihak yang dianggap bertanggungjawab terhadap pengerukan kekayaan tersebut adalah: pemerintah pusat, perusahaan asing serta perusahaan swasta yang melalui kebijakan dan tindakannya telah memiskinkan masyarakat Melayu Riau.

Slogan perlawanan masyarakat Melayu segera berubah menjadi tekanan dan tuntutan dalam

JADUAL 1 Redefinisi Identitas Orang Melayu

	Stereotif Identitas pada Orde Baru	Redefinisi Identitas Pascareformasi
Identitas Orang Melayu	Pemalas, tidak suka bekerja keras, suka bersenang-senang dan menghabiskan waktu.	Tidak rakus dan mengeksploitasi alam. bersyukur dengan yang didapat dan lebih banyak menggunakan waktu untuk ibadah.
	Mudah dimanfaatkan (negatif)	Terbuka dan merangkul kepada pendatang
	Menjauhi konflik	Menyelesaikan konflik dengan prinsip tidak ada yang dibuat malu.

Sumber: hasil penelitian 2018

pengelolaan dan pembagian keuntungan sumber daya alam di Riau. Tekanan dan tuntutan ini juga sekaligus untuk melawan stereotype masyarakat Melayu yang dilabeli pemalas dan tidak mau bekerja keras. Stereotip tersebut sekian lama telah menjadi penghambat masyarakat Melayu untuk menjadi pemimpin di wilayahnya sendiri. Dalam konteks pekerjaan, stereotip tersebut menghambat masyarakat Melayu mengakses pekerjaan karena sudah dilabeli perusahaan memiliki karakter yang kurang baik. Tekanan agar perusahaan mulai lebih memperhatikan masyarakat Melayu dalam rekrutmen pegawai menjadi salah satu tuntutan yang harus dipenuhi perusahaan. Tekanan pada perusahaan untuk memprioritaskan *anak negeri* merupakan perlawanan terhadap kebijakan perusahaan selama ini.

Slogan *anak negeri* juga merambah dimensi politik lokal Riau. Slogan *anak negeri* dalam politik lokal bergantian digunakan dengan slogan *putera asli daerah*, *pribumi* dan *bumi putera*. Kehadiran slogan *anak negeri* memberikan pesan tentang hak keistimewaan yang diminta Orang Melayu.

“SDM (sumber daya manusia) Melayu banyak kurang, ini yang harus segera dibenahi. Sebab jika tidak Melayu akan hilang. Orang bukan Melayu tidak membela Orang Melayu. Kalau ada masalah di tanah Melayu, pendatang tidak bertanggungjawab untuk membela. Pendatang juga harus menghormati Orang Melayu, budaya Melayu juga bahasa. Orang Melayu menjadi pemimpin untuk menjaga marwah Melayu. Jika bukan Orang Melayu siapa lagi?” (Tengku Effendi, Informan 2).

Slogan anak negeri muncul bersamaan dalam pemilihan legislatif daerah, pemilihan eksekutif daerah, dan penunjukan jabatan-jabatan strategis lainnya. Pada akhirnya slogan *anak negeri* menjadi salah satu sumber politik identitas di Riau. Slogan ini telah menarik garis tegas antara Orang Melayu Riau dengan pendatang di Riau. Situasi ini membuat kontestasi pilkada menjurus pada pertarungan politik identitas. *Anak negeri* dalam konteks politik lokal telah menyampaikan pesan komunikasi bahwa Orang Melayu adalah tuan rumah di Riau. Penekanan terhadap posisi tuan rumah ini menjadi dasar dalam membenarkan tindakan bahwa *Orang Melayu* lebih berhak untuk memimpin di wilayah mereka sendiri.

“Adalah wajar jika di setiap daerah memiliki keinginan untuk menempatkan putera terbaiknya untuk menjadi pemimpin wilayah. Tidak perlu terlalu dipermasalahkan. Orang Melayu juga begitu” (Budi Hermanto, Informan 6).

Wacana identitas Melayu adalah *anak negeri* memiliki persamaan dengan wacana Melayu adalah Islam. Keduanya digunakan untuk meng-*counter* stereotip negatif masyarakat Melayu. Perbedaannya, jika Melayu adalah Islam merupakan usaha dalam membersihkan stereotip masyarakat Melayu secara wacana, maka Melayu adalah *anak negeri* merupakan tindakan langsung untuk meraih kekuasaan di wilayah sendiri serta melawan kebijakan yang diskriminatif pada masyarakat Melayu.

ANALISIS

MOTIF PEMBENTUKAN IDENTITAS BARU MELAYU PASCAREFORMASI

Rekonstruksi identitas Orang Melayu berjalan pada dimensi stereotip karakter Orang Melayu. Situasi terjadi kerana batasan masyarakat Melayu secara objektif seperti Melayu itu harus Islam, berbudaya Melayu dan berbahasa Melayu telah dipahami secara umum. Tantangan yang dihadapi justru mengubah penilaian bahwa masyarakat Melayu itu pemalas, tidak suka bekerja keras, menghindari konflik dan mudah dimanfaatkan. Stereotip tersebut telah menempatkan posisi masyarakat Melayu menjadi lemah ketika dihadapkan dengan pendatang, perusahaan dan pemerintahan pusat. Tindakan yang dilakukan Orang Melayu terhadap stereotip tersebut adalah melawan dengan wacana tandingan. Wacana tandingan lahir karena Orang Melayu menyadari bahawa stereotip negatif lahir karena ketidakpahaman pendatang terhadap kehidupan masyarakat Melayu.

Redefinisi karakter masyarakat Melayu menitikberatkan pada bagaimana perilaku masyarakat Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku tersebut merupakan perwujudan dari konsep-konsep nilai yang diyakini oleh masyarakat Melayu itu sendiri. Nilai-nilai tersebut secara tegas dikatakan sebagai Islam. Secara tidak langsung elit Melayu ingin mengatakan bahwa perilaku masyarakat Melayu merupakan perwujudan nilai-nilai Islam. Praktik melekatkan identitas etnis dengan suatu agama merupakan penanda yang penting bagi sebagian kelompok etnik (Chandran 2015). Dalam kesustraan Melayu tradisional, Orang Melayu dituntut untuk menerapkan kebijaksanaan, yaitu melaksanakan tugas dan kewajiban *hablumminallah* dan *hablumminannas* karena manusia adalah khalifah Allah SWT di muka bumi (Jamian & Idris

2019). Masyarakat Melayu yang menjunjung nilai-nilai Islam oleh karenanya menolak jika karakter Orang Melayu dilekatkan pada kebiasaan yang bertolak belakang dengan nilai-nilai Islam seperti pemalas dan tidak suka bekerja keras.

Upaya memberikan identitas baru pada masyarakat *Melayu* Riau dilakukan dengan melekatkan nilai-nilai Islam pada semua aspek kehidupan Orang Melayu. Hasil temuan lapangan ini sesuai dengan kajian Ramli (2016) yang menegaskan bahwa bagi orang Melayu, agama Islam adalah anutannya. Seluruh nilai budaya dan norma-norma sosial masyarakat wajib merujuk pada ajaran agama tersebut. Acuan ini menyebabkan Islam tidak dapat dipisahkan dari budaya, adat istiadat, maupun norma-norma sosial kehidupan orang Melayu. Hasil penelitian ini mempertegas bahwa Orang Melayu tidak hanya menempatkan Islam sebagai agama tetapi juga wujud nilai dan perilaku Orang Melayu dalam kehidupan sehari-hari.

Konstruksi identitas Melayu pascareformasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk menegosiasikan ulang posisi masyarakat Melayu di Riau, khususnya di Pekanbaru. Keterbukaan untuk mengemukakan pendapat di era reformasi memberikan kesempatan pada elit lokal untuk merekonstruksi ulang identitas Melayu Riau. Reformasi juga telah memberikan ruang komunikasi kepada masyarakat Melayu untuk meminta hak pembagian sumber daya alam kepada perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Riau. Terbukanya ruang komunikasi tersebut tidak dapat digunakan secara maksimal ketika citra masyarakat Melayu masih dianggap negatif. Hal ini yang disadari oleh elit Melayu sehingga merekonstruksi wajah baru masyarakat Melayu Riau di era reformasi. Kemampuan elit Melayu dalam merekonstruksi identitas disebabkan di era reformasi elit menjadi orang kuat di tingkat lokal karena mampu membangun oligarki politik dan ekonomi (Suaib & Zuada 2015).

TUJUAN PEMBENTUKAN IDENTITAS BARU MELAYU PASCAREFORMASI

Rekonstruksi identitas yang dilakukan elit Melayu dilatarbelakangi oleh banyaknya stereotip negatif tentang karakter masyarakat Melayu yang hidup dan berkembang di Pekanbaru. Stereotip negatif ini telah membuat posisi masyarakat Melayu menjadi lemah ketika dihadapkan dengan pendatang. Posisi lemah ini tidak menguntungkan di era reformasi

yang telah mengeluarkan kebijakan otonomi daerah. Stereotip negatif tersebut secara tidak langsung telah mendiskriminasi masyarakat Melayu di negerinya sendiri. Dampak yang ditimbulkan dari stereotip negatif tersebut menjadi salah satu sumber yang melemahkan posisi masyarakat Melayu. Redefinisi dilakukan untuk meluruskan pandangan yang salah tentang karakter masyarakat Melayu serta dimaksudkan juga untuk mereposisi kedudukan masyarakat Melayu dalam struktur sosial di Pekanbaru Riau. Upaya elit dalam merekonstruksi pemahaman terhadap karakter masyarakat Melayu yang dilabel secara negatif merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing masyarakat Melayu dengan pendatang di Pekanbaru Riau. Rekonstruksi identitas yang dilakukan elit Melayu merupakan sebuah tindakan instrumental yang bertujuan untuk mereposisi kedudukan di bidang sosial, ekonomi-politik di Riau.

Khusus di bidang ekonomi-politik, harapan terhadap reposisi kedudukan Orang Melayu terwakilkan melalui slogan *anak negeri*. Melayu itu *anak negeri* merupakan slogan yang memberikan pesan bahwa terdapat kelompok yang lebih berhak untuk menikmati dan mengatur kekayaan alam yang ada di Riau. *Anak negeri* merupakan identitas baru masyarakat *Melayu* untuk menyatakan siapa tuan rumah di Provinsi Riau. Pada praktiknya slogan *anak negeri* juga digunakan untuk menekan perusahaan-perusahaan besar di Riau yang selama mengeksploitasi kekayaan alam di Riau dianggap tidak berkontribusi pada masyarakat Melayu. Identitas Melayu adalah *anak negeri* menjadi pintu masuk bagi elit Melayu untuk menuntut prioritas kepada perusahaan di Riau untuk memberi keistimewaan pada masyarakat Melayu dalam penerimaan pegawai, pemberian bantuan serta proyek pekerjaan.

Wajah baru identitas Melayu juga berlangsung di ranah nilai-nilai yang disematkan pada masyarakat Melayu. Nilai-nilai tersebut adalah Melayu itu Islam dan Melayu itu *anak negeri*. Pelekatan bahwa Melayu itu adalah Islam merupakan sebuah usaha untuk menampilkan sebuah identitas yang positif. Islam menjadi suatu kebanggaan sekaligus solusi terhadap stereotype negatif terhadap orang Melayu Riau di Pekanbaru. Mengidentikan Islam dengan Melayu sama artinya dengan menyatakan bahwa stereotype masyarakat Melayu itu pemalas dan tidak suka bekerja keras adalah kesalahan, karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Masyarakat Melayu itu Islam tidak hanya sebagai syarat identitas tetapi juga rujukan nilai-

nilai yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari masyarakat Melayu. Pelekat Melayu adalah Islam mengisyaratkan bahwa karakter masyarakat Melayu haruslah dilihat berdasarkan nilai-nilai keislaman. Keidentikkan Islam Melayu dan Melayu Islam pada akhirnya menjadi sebuah identitas karakter yang melekat dalam budaya Melayu (Aprizal & Yusri 2013). Redefinisi Melayu itu adalah Islam bukan karena dahulunya Orang Melayu tidak Islam. Redefinisi ini justru memperkuat nilai-nilai Islam mulai dari material sampai ke abstraksi, mulai dari berpikir sampai berperilaku. Ketika Islam sudah menjadi ruh maka Melayu adalah wadahnya, konsekuensi ini membuat mulai dari cara berpikir, bersikap dan bertindak laku masyarakat Melayu adalah perwujudan dari nilai-nilai Islam itu sendiri.

Rekonstruksi identitas Melayu juga menyentuh ranah psikologi. Tekanan pemerintah Orde Baru pada masa lalu yang membuat masyarakat Melayu terpinggirkan di daerahnya sendiri menjadi trauma tersendiri. Untuk mencegah terulangnya kembali kondisi tersebut maka slogan *anak negeri* muncul sebagai perlawanan. *Anak negeri* simbol kebangkitan dari keterpurukan identitas di masa lalu. Pesan yang ingin disampaikan dalam slogan *anak negeri* adalah tentang siapa tuan rumah di Riau. Slogan ini juga merupakan pesan yang disampaikan kepada pendatang di Riau untuk menghormati dan menghargai masyarakat Melayu sebagai pemilik wilayah. Kondisi yang tidak hanya terjadi di Riau ini juga merupakan dampak lain dari otonomi daerah yang justru telah memfasilitasi berbagai persoalan di daerah, seperti etno-nasionalisme dalam bentuk nepotisme 'putra daerah' (Rahmatunnisa 2015). *Anak negeri* merupakan kumpulan emosional masyarakat Melayu Riau yang sadar pentingnya meraih posisi strategis dalam sistem sosial dan pemerintahan di Riau. *Anak negeri* juga bermakna hak dalam mendapat pembagian kekayaan alam Riau secara adil.

Di tengah masyarakat, praktik penguatan status *anak negeri* muncul dalam dua konteks. Pertama dalam konteks politik lokal, dan kedua muncul dalam konteks tuntutan pembagian keuntungan pengelolaan sumber daya alam Riau. Dalam konteks politik lokal, *anak negeri* merupakan sebuah kekuatan untuk berkompetisi dalam memperebutkan kepemimpinan daerah. *Anak negeri* dalam konteks ini bermakna masyarakat Melayu dapat mengatur daerahnya sendiri. Sejarah masa lalu di mana kepemimpinan di Riau banyak dijabat oleh mereka

yang berasal dari luar Riau menjadi rujukan agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi.

Dalam konteks sumber daya alam, identitas *anak negeri* muncul dalam hal akses dan pembagian keuntungan pengelolaan. *Anak negeri* digunakan sebagai akses untuk memperoleh keistimewaan dalam penerimaan pegawai di perusahaan swasta dan asing. Munculnya identitas *anak negeri* telah mendesak perusahaan-perusahaan di Riau untuk menerima masyarakat Melayu sebagai pegawai. Identitas *anak negeri* telah membuat posisi tawar masyarakat Melayu menjadi berenergi ketika melakukan negosiasi. Tuntutan bagi hasil keuntungan pengelolaan sumber daya alam menjadi sebuah pertarungan harga diri bahwa kekayaan alam Riau harus dinikmati masyarakat Melayu sebagai pemilik wilayah.

Bagaimana elit mewacanakan identitas baru masyarakat Melayu dapat dijelaskan dengan meminjam kajian arus komunikasi (Attamimi 2015). Pengelolaan wacana identitas merupakan arus komunikasi yang dikendalikan elit, di mana penerjemahan arus komunikasi ini telah terenkapsulasi oleh paradigma komunikasi satu arah yang arusnya didominasi dari elit ke masyarakat. Masyarakat hanya bisa mengganggu dan menerima dengan seksama atas tiap informasi yang masuk, tanpa berusaha untuk direduksi, atau bahkan ditolak sekalipun.

Tindakan instrumental yang dilakukan elit Melayu di Riau memanfaatkan politik identitas di era otonomi daerah. Keleluasaan daerah untuk mengatur dirinya sendiri mendorong identitas kultural menemukan momentumnya pada masyarakat Riau yang selama ini terpinggirkan. Sentimen lama masyarakat Melayu yang merasa terzalimi menjadi motif yang digunakan oleh elite Melayu untuk mengikat emosional masyarakat melalui wacana yang disebarluaskan. Identitas etnik pada situasi tersebut telah mengalami politisasi. Pembentukan identitas pasca reformasi pada masyarakat Melayu di Pekanbaru Riau masih berada pada tingkatan wacana yang dikelola elit. Masih dibutuhkan sosialisasi agar identitas baru tersebut diterima dan dijalankan sebagai bagaian keseharian Orang Melayu di Pekanbaru Riau. Saat ini tantangan bagi elit Melayu Riau adalah bagaimana arah pembentukan identitas baru pascareformasi ini dapat mereposisi kedudukan Orang Melayu menjadi lebih baik namun isu identitas tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu.

KESIMPULAN

Usaha pembentukan identitas baru Melayu pascareformasi bertujuan mengangkat kebanggaan menjadi Orang Melayu. Selain kebanggaan menjadi Melayu, identitas baru juga berupaya memberikan keuntungan secara sosial, politik-ekonomi dan memberikan posisi yang lebih setara dalam hubungan antar etnik. Dengan demikian identitas baru pascareformasi yang diwacanakan elit menjanjikan harapan baru bagi Orang Melayu Riau untuk memperbaiki nasibnya. Energi baru ini digunakan oleh kelompok Melayu di Pekanbaru Riau untuk melakukan tindakan secara rasional instrumental. Di lapangan tindakan tersebut telah memberi garis tegas siapa yang bisa dikatakan sebagai Orang Melayu Riau dan siapa yang bukan. Konstruksi identitas baru pascareformasi diwujudkan dalam dua bentuk; Melayu itu adalah Islam dan Melayu itu adalah *anak negeri*. Kedua bentuk identitas baru tersebut bertujuan mereposisi kedudukan masyarakat Melayu dalam sistem sosial-politik di Riau yang didorong untuk lebih mengutamakan Orang Melayu. Untuk mencapai tujuan tersebut, elit memanfaatkan isu identitas untuk menggerakkan masyarakat Melayu dalam melakukan tekanan baik kepada pemerintah pusat, perusahaan dan pendatang di Riau. Tindakan instrumental tersebut merupakan langkah yang dianggap paling efisien oleh elit Melayu dalam mencapai perubahan posisi sosial, ekonomi-politik di Pekanbaru Riau.

PENGHARGAAN

Penelitian ini turut dibiayai oleh: Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi iRepublik Indonesia. Sesuai Dengan Kontrak Penelitian Nomor: 542/UN30.15/LT/2018.

RUJUKAN

- Andriana, Nina. 2011. Hegemoni ideologi dalam konstruksi identitas budaya masyarakat Melayu Riau pada desain arsitektur. *Widyaiset* 14(1): 113-22.
- Aprizal and Ali Yusri. 2013. Relasi kekuasaan dalam budaya Melayu Riau. *Demokrasi & Otonomi Daerah* 11(2): 71-80.
- Attamimi, Natasha. 2015. Hegemoni dalam komunikasi: Sebuah analisis atas arus komunikasi dan informasi. *Politika* 1(1):78-86.
- Basid, Abdul and Siti Khoirun Niswah. 2018. Tindakan sosial tokoh husna dalam novel lovely hana karya indra rahmawati berdasarkan perspektif Max Weber. *Lingua* XIV(1):1-8.
- Chandran, Rona. 2015. Beyond arbitrary labels : Understanding ethnic identity development among Chindians. *SEARCH* 7(2):1-17.
- Creswell, J. W. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. 3rd edition. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Din, Mohamed Anwar Omar, Wan Ahmad Fauzi Wan Husain, Mat Zin Mat Kib, and Junaidi Abu Bakar. 2017. Peranan UMNO menegakkan Islam dalam perlembagaan persekutuan: Satu kajian secara kronologikal. *Akademika* 87(1):91-109.
- Haboddin, Muhtar. 2012. Menguatnya politik identitas di ranah lokal. *Studi Pemerintahan* 3(1):116-34.
- Haryanto. 2009. Elit politik lokal dalam perubahan sistem politik. *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 13(2):131-48.
- Hun, Pue Giok and Charanjit Kaur. 2014. Identiti etnik minoriti di Malaysia : Antara realiti sosial tafsiran autoriti dan tafsiran harian. *Akademika* 84(1): 57-70.
- Husain, Wan Ahmad Fauzi Wan, Anisah Che Ngah & Mohamed Anwar Omar Din. 2017. Islam agama bagi persekutuan: Satu kajian sejarah perundangan. *Akademika* 87(3):177-193.
- Jamian, Muhd Norizam and Zubir Idris. 2019. Kebijaksanaan adab dalam Hikayat Melayu tradisional wisdom of manner in the traditional Malay Hikayat. *Akademika* 89(Special Issue): 81-91.
- Muhlis, Alis and Norkholis. 2016. Analisis tindakan sosial Max Weber dalam tradisi pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari (Studi Living Hadis). *Jurnal Living Hadis* 1(2): 242-58.
- Prasetya, Yanuar Yudha. 2014. Dinamika Internal Kekuasaan Antar Elit Dalam Organisasi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lamongan. 3(3):369-380.
- Rahmatunnisa, Mudiyyati. 2015. Jalan terjal kebijakan desentralisasi di Indonesia pada Era Reformasi. *Ilmu Hukum* 2(3):505-522.
- Ramli, Efni. 2016. Tunjuk ajar Melayu Riau. *Al-Ishlah Jurnal Pendidikan* 8(2):196-208.
- Salam, Noor Efni. 2012. Simbol dan identitas; Kajian tentang negosiasi dan konsolidasi terhadap simbol budaya dalam mempertahankan identitas masyarakat Riau. *Ilmu Komunikasi Universitas Bandar Lampung* 4(4): 71-82.
- Sjaf, Sofyan, Lala M. Kolopaking, Nurmala K. Pandjaitan, and Didin S. Damanhuri. 2012. Pembentukan identitas etnik di arena ekonomi politik lokal. *Soladity: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 6(2): 170-78.
- Suaib, Eka and La Husen Zuada. 2015. Fenomena 'Bosisme Lokal' di era desentralisasi: Studi hegemoni politik nur alam di Sulawesi Tenggara. *Penelitian Politik* 12(2): 51-69.

Venus, Anter. 2015. *Filsafat Komunikasi Orang Melayu*.
Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Alfarabi (corresponding)
Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Bengkulu
Indonesia
E-mail: alfarabi@unib.ac.id

Antar Venus
Prodi Manajemen Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Padjajaran
Indonesia
E-mail: venusantar@yahoo.com

Nuryah Asri Syafirah
Prodi Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Padjajaran
Indonesia
E-mail: asri_sjafirah@yahoo.co.id

Noor Efni Salam
Prodi Ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Riau
Indonesia
E-mail: efnisalam@gmail.com

Received: 16 March 2019

Accepted: 10 September 2019